



# **Pedoman Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisip Petta Baringeng Tahun 2022**

**Konsentrasi/Peminatan:  
Pemerintahan Digital/EGovernment, Keuangan Daerah,  
Pemerintahan Kota, dan Pemerintahan Desa**

**“Menuju Pendidikan  
di Era Revolusi  
Industri 4.0 Dan  
Sistem Kegiatan  
Merdeka Belajar-  
Kampus Merdeka  
(KMB-MB)  
Berbasis Teknologi  
Informasi”**



**[www.stisipb.ac.id](http://www.stisipb.ac.id)**

**Kampus Utama: Jalan Poros Salaonro Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau  
Kab. Soppeng - Sulawesi Selatan Kode Pos 90871 Tlp/Fax 0484-421512**

PEDOMAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
STISIP PETTA BARINGENG  
TAHUN 2022



Dikembangkan Berdasarkan  
Pedoman Kurikulum Merdeka  
Dikti Tahun 2020 dan KKNi

Kampus: Jalan Poros Salaonro Kelurahan Ujung  
Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng - Prov. Sulawesi Selatan  
Kode Pos 90871 Telepon 0484-421512, Faximile 0484-421512

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Pedoman Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Petta Baringeng Tahun 2022.

Salaonro, 3 January 2022

Ketua,  
Stisip Petta Baringeng,

**H. Andi Basri Jaya, S.Sos, M.**

NIDN: 0931036801

Ketua,  
Prodi Ilmu Pemerintahan,

**Dr. Muh. Said, S.Sos, M.Si**

NIDN: 0906097401

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
I Profil	1
II Visi	1
III Misi	2
IV Tujuan	2
V Capaian Pembelajaran	3
VI Mata Kuliah	5
IV.A Sebaran Kelompok Mata Kuliah	7
IV.B Sebaran Mata Kuliah Menurut Peminatan Studi	9
Pemerintahan Digital/E-Government	9
Pemerintahan dan Keuangan Daerah	12
Pemerintahan Kota	14
Pemerintahan Desa	17
V Deskripsi Singkat Mata Kuliah	21

## KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STISIP PETTA BARINGENG

### I. PROFIL

Departemen/Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Petta Baringeng, melaksanakan pendidikan dibidang ilmu pemerintahan yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat. Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Petta Baringeng, juga mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat pada umumnya. Gelar yang diperoleh untuk para lulusan adalah **Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.)**.

Prospek Kerja Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Petta Baringeng, memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada para peserta didik agar menjadi tenaga yang terlatih, terampil, dan profesional, sehingga menghasilkan lulusan/alumni yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama ini Program Studi Ilmu Pemerintahan telah menghasilkan lulusan yang menempati posisi di lapangan sebagai: **Aparat Pemerintah/Birokrat di tingkat Pusat/Daerah Asisten Peneliti Staf untuk Anggota Legislatif Pusat/Daerah Anggota Legislatif Pusat/Daerah Anggota Partai Politik Aktivistis LSM/Ormas Jurnalis Pemerintahan/Politik Konsultan Pemerintahan Tenaga Pendidik/Dosen.**

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Petta Baringeng mengasuh Empat program pendidikan kekhususan/peminatan antara lain:

1. Pemerintahan Digital/E-Government
2. Pemerintahan dan Keuangan Daerah
3. Pemerintahan Kota
4. Pemerintahan Desa

### II. VISI

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan kualitas proses akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Pemerintahan dalam bidang kajian **Pemerintahan Digital, Keuangan Daerah, Pemerintahan Kota dan**

**Pemerintahan Desa** yang diakui secara local, nasional dan global pada tahun 2027

### III. MISI

1. Melaksanakan pendidikan bidang ilmu pemerintahan yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat pada umumnya.
3. Melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (*quality assurance*).
4. Menerapkan sistem manajemen profesional berbasis transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan hubungan kelembagaan yang efektif dan efisien.
5. Menjalin kerjasama dalam bidang pengembangan akademik, serta meningkatkan serta mengembangkan pengelolaan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (PKM) secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kesetaraan, kemitraan, dan saling percaya.

### IV. TUJUAN

1. Terlaksananya kegiatan pendidikan di bidang ilmu pemerintahan dengan menggunakan kurikulum pemerintahan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan bidang ilmu pemerintahan yang kompeten dan bersaing dalam level lokal, nasional, regional, dan internasional;
2. Tercapainya peningkatan lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memiliki integritas tinggi, berkarakter kuat, berwawasan, dan berdaya saing lokal, nasional, regional, dan internasional;
3. Tercapainya kemampuan lulusan untuk berdaya saing dalam bursa tenaga kerja;
4. Terwujudnya peningkatan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian ilmiah baik dari segi kuantitas maupun kualitas penelitian yang menitikberatkan kepada kajian **Pemerintahan Digital, Keuangan**

**Daerah, Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Desa;** yang mempunyai relevansi dan berguna bagi yang berkepentingan dan masyarakat luas;

5. Terlaksananya kegiatan dosen dalam melakukan pengabdian pada masyarakat yang mampu menopang pembelajaran serta kemajuan keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan yang dapat diaplikasikan bagi pemerintah, privat, dan masyarakat luas;
6. Terbentuknya organisasi dan manajemen Program Studi yang transparan dan akuntabel;
7. Terwujudnya hubungan kerja sama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri sebagai mitra strategis Program Studi Ilmu Pemerintahan;
8. Terlaksananya hubungan kerja sama untuk kepentingan penyediaan kesempatan kerja, magang, praktikum, dan pelatihan pembelajaran;
9. Terlaksananya kerjasama Tri Dharma dan pendanaan riset serta beasiswa bagi mahasiswa.

#### V. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Departemen/Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Petta Baringeng merumuskan capaian Pembelajaran (*Expected Learning Outcomes, ELO*) sesuai dengan deskripsi KKN level 6 (Setara Serjana) Capaian pembelajaran tersebut menyatakan bahwa lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Petta Baringeng mampu untuk, antara lain:

ELO 1 : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.

ELO 2 : Mampu menganalisis fenomena pemerintah berdasarkan prinsip, prosedur, dan etika ilmiah untuk menghasilkan kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.

ELO 3 : Mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, berkualitas, dan terukur dalam penelitian/kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.

ELO 4 : Mampu menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif dan kuantitatif terkait kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.

ELO 5 : Mampu mengelola data yang valid dan akurat berdasarkan teknologi informasi dalam kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.

ELO 6 : Mampu mengambil keputusan dengan tepat dalam konteks penyelesaian masalah pemerintah dalam kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.

ELO 7 : Mampu membangun dan mengembangkan kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.

ELO 8 : Mampu berkontribusi pada kepemimpinan dan membuat inovasi dalam kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa. dengan cara yang terpercaya dan progresif

ELO 9 : Mampu mengembangkan aplikasi kajian pemerintahan digital, keuangan daerah, pemerintahan kota dan pemerintahan desa.



## VI. MATA KULIAH

Mata Kuliah dibentuk dari korelasi antara bahan kajian dan capaian pembelajaran, dimana setiap bahan kajian mengandung bobot bahan kajian sehingga kedalaman mata kuliah dapat ditentukan yang dinyatakan dalam bentuk SKS. Mata Kuliah terdiri dari

1. Mata Kuliah Wajib Nasional, (7 SKS)
2. Mata Kuliah Wajib Institusional/Interdisipliner, (14-16 SKS)
3. Mata Kuliah Wajib Program Studi (min 60 % dari total SKS)
4. Mata Kuliah Pilihan (maks 24 SKS)
5. Kegiatan Magang/Bentuk Lainnya

Proses pembelajaran untuk kumpulan mata kuliah Wajib Nasional dan Institusional/Interdisipliner (dirancang di semester 1 dan 2, kecuali Kewirausahaan, KKKLP dan Tugas Akhir), mahasiswa dapat memilih dilakukan diluar program studi dalam Stisip Petta Baringeng, dilaksanakan selama 1 sampai 2 semester. Pelaksanaan MK Wajib Nasional dan Institusional/Interdisipliner dikoordinasikan oleh Pimpinan, kecuali untuk Tugas Akhir dilakukan oleh Prodi masing-masing.

Proses pembelajaran untuk mata kuliah wajib program studi (nomor 3), mahasiswa dapat menjalankan proses pembelajaran di prodi yang sama di PT/lembaga lain maksimal sebanyak 40 SKS dengan ketentuan:

1. Jika diambil dalam bentuk mata kuliah di Prodi yang sama di luar PT, maka mahasiswa dapat mengambil di Semester 3 sampai 6;
2. Apabila diambil dalam bentuk kegiatan seperti *Proyek di desa, Summer Course, Mengajar Sekolah, Pertukaran Pelajar, Kegiatan Wirausaha, Studi Independen atau Proyek Kemanusiaan*, maka mahasiswa dapat mengambil di Semester 3 sampai 6 dan pelaksanaannya dapat dilakukan di liburan antar semester;
3. Apabila diambil dalam bentuk kegiatan *Magang, Penelitian/riset*, maka mahasiswa dapat mengambil di Semester 6 sampai 7 dan pelaksanaannya dapat dilakukan di liburan antar semester;

Kegiatan tersebut di atas harus dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang di MK Wajib. Sedangkan Proses pembelajaran untuk mata kuliah Pilihan, mahasiswa dapat memilih dilakukan diluar Prodi di dalam maupun di luar Stisip Petta Baringeng.

Prodi diharapkan dapat menentukan atau merumuskan:

1. Daftar MK Wajib yang dapat diambil di prodi lain baik di Stisip Petta Baringeng maupun di luar Stisip Petta Baringeng
2. Prodi dapat memberikan daftar MK yang ekuivalen untuk kegiatan pembelajaran di luar Stisip Petta Baringeng selama 2 Semester terutama Magang, Proyek Desa, Pertukaran Pelajar dll.

Pelaksanaan Kegiatan *Magang, Proyek di desa, Mengajar Sekolah, Pertukaran Pelajar, Penelitian/riset, Kegiatan Wirausaha, Studi Independen atau Proyek Kemanusiaan* diatur sebagai berikut:

1. Program Studi menyiapkan Tim Konversi SKS berdasarkan SK Ketua/Pembantu Ketua I yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Program Studi, GPM dan Perwakilan Dosen
2. Pengakuan setiap Kegiatan Magang dalam SKS dengan perhitungan 1 (satu) SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh menit) atau 45 (empat puluh lima) jam dengan minimal kegiatan selama 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan yaitu 5 (lima) hari kerja per minggu, 8 (delapan) jam per hari (Keputusan Menteri Riset dan Teknologi no 123 Tahun 2019).
3. Setiap mahasiswa yang akan menempuh Kegiatan Magang atau bentuk lainnya diwajibkan menyusun proposal dan diajukan kepada Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan.
4. Setiap kegiatan magang atau bentuk lainnya wajib ada pembimbing dari Program Studi dan pembimbing dari Mitra. Prodi bersama pembimbing membekali mahasiswa terkait pemenuhan CPL dan menyiapkan rubrik evaluasi yang akan diberikan kepada Pembimbing Mitra.
5. Dalam hal mewadahi kalau ada mahasiswa yang akan magang selama 1 semester (6 bulan) atau setara dengan 21 SKS, maka Prodi wajib menyiapkan mata kuliah apa saja yang dapat digunakan sebagai konversi dari kegiatan tersebut.
6. Konversi atau penyetaraan setiap kegiatan magang atau bentuk lainnya wajib mendapatkan persetujuan Ketua/Pembantu Ketua I dalam bentuk SK Ketua/Pembantu Ketua I

#### IV.A. Sebaran Kelompok Mata Kuliah

Ada pun sebaran menurut kelompok mata kuliah:

1	Pendidikan Agama	A
2	Bahasa Indonesia	A
3	Pendidikan Kewarganegaraan Dan Anti Korupsi	A
4	Bahasa Inggris	A
5	Pengantar Sains Komputer dan ICT	B
6	Pengantar Ilmu Pemerintahan	C
7	Dasar-Dasar Ilmu Politik	C
8	Pengantar Ilmu Hukum	B
9	Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi	B
10	Sistem Sosial Indonesia	B
11	Dasar-Dasar Filsafat dan Logika	B
12	Pengantar Ilmu Komunikasi	E
13	Sistem Politik Indonesia	C
14	Sistem Pemerintahan Indonesia	C
15	Dasar-Dasar E-government/Pemerintahan Digital	C
16	Asas-Asas Manajemen	B
17	Pengantar Statistik Sosial	B
18	Ekonomi Politik	B
19	Konstitusi Dan Kelembagaan Pemerintahan	C
20	Teori Politik/Pemerintahan	C
21	Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik	C
22	Sistem Pemerintahan Daerah	C
23	Pemikiran Politik Indonesia	C
24	Hukum Tata Pemerintahan	C
25	Analisa Politik/Pemerintahan	C
26	Etika Politik/Pemerintahan	C
27	Manajemen Pemerintahan Daerah	C
28	Komunikasi Politik/Pemerintahan	E
29	Pengenalan Organisasi dan Jaringan Komputer	B
30	Ekologi Pemerintahan	C
31	Proses Legislatif Di Indonesia	C
32	Sistem Perpajakan Indonesia	C
33	Metodologi Penelitian Sosial	B
34	Pengenalan Sistem dan Manajemen Basis Data	B
35	Birokrasi Pemerintahan Indonesia	C
36	Sistem Pemerintahan Desa	C
37	Kebijakan Publik	C
38	Manajemen Keuangan Daerah	C
39	Global E-Government	C

40	Metodologi Ilmu Pemerintahan	C
41	Pembangunan Masyarakat Lokal	B
42	Sistem Pengawasan Pemerintahan	C
43	Public E-Service	C
44	Perbandingan Sistem Pemerintahan	C
45	Sistem Kepartaian Dan Pemilu Indonesia	C
46	Artificial Intelligence Dan Big Data Dalam E-Government	D
47	Desain dan Implementasi Infrastruktur E-Government	D
48	Kapita Selektta Ilmu Pemerintahan: Isu-Isu Keuangan Daerah	D
49	Kapita Selektta Ilmu Pemerintahan: Isu-Isu Pemerintahan Kota	D
50	Kapita Selektta Ilmu Pemerintahan: Isu-Isu Pemerintahan Desa	D
51	Local E-Government	D
52	Analisis dan Evaluasi Sistem E-Government	D
53	Magang dan Praktek Lapang Pemerintahan Digital	D
54	Magang dan Praktek Lapang Keuangan Daerah	D
55	Magang dan Praktek Lapang Pemerintahan Kota	D
56	Magang dan Praktek Lapang Pemerintahan Desa	D

#### Keterangan Kelompok Mata Kuliah

- A** : Mata Kuliah Umum  
**B** : Mata Kuliah Instutional Dan Interdisipliner  
**C** : Mata Kuliah Wajib Departemen Proram Studi  
**D** : Mata Kuliah Peminatan

## IV.B. Sebaran Mata Kuliah Menurut Peminatan Studi

**STISIP PETTA BARINGENG**  
**Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Konsentrasi Studi: Pemerintahan Digital/E-Government**

**Semester I**

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	293UU111	Pendidikan Agama	2
2	293UU112	Bahasa Indonesia	2
3	293UU113	Pendidikan Kewarganegaraan Dan Anti Korupsi	2
4	293UU114	Bahasa Inggris	2
5	393SS204	Pengantar Sains Komputer dan ICT	3
6	393PP202	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3
7	393PP201	Dasar-Dasar Ilmu Politik	3
8	393SS205	Pengantar Ilmu Hukum	3
9	393SS209	Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi	3
10	193SS501	Kelas Tutorial I : Keterampilan Teknologi Informasi	1
<b>Jumlah SKS</b>			<b>24</b>

**Semester II**

No		Mata Kuliah	SKS
1	293SS202	Sistem Sosial Indonesia	2
2	293SS101	Dasar-Dasar Filsafat dan Logika	2
3	293IK301	Pengantar Ilmu Komunikasi	2
4	393PP205	Sistem Politik Indonesia	3
5	393PP203	Sistem Pemerintahan Indonesia	3
6	293SS102	Dasar-Dasar E-government/Pemerintahan Digital	2
7	293SS203	Asas-Asas Manajemen	2
8	393SS206	Pengantar Statistik Sosial	3
9	193SS502	Kelas Tutorial II: Keterampilan Teknologi Informasi	1
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>

**Semester III**

No		Mata Kuliah	SKS
1	393PP301	Ekonomi Politik	3
2	393PP207	Konstitusi Dan Kelembagaan Pemerintahan	3
3	393PP208	Teori Politik/Pemerintahan	3
4	293PP601	Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik	2
5	393PP306	Sistem Pemerintahan Daerah	3
6	393PP209	Pemikiran Politik Indonesia	3
7	393PP602	Hukum Tata Pemerintahan	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>

**Semester IV**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393PP210 Analisa Politik/Pemerintahan	3
2	293PP307 Etika Politik/Pemerintahan	2
3	393PP308 Manajemen Pemerintahan Daerah	3
4	393IK315 Komunikasi Politik/Pemerintahan	3
5	393PP611 Pengenalan Organisasi dan Jaringan Komputer	3
6	293PP309 Ekologi Pemerintahan	2
7	293PP212 Proses Legislatif Di Indonesia	2
8	393PP603 Sistem Perpajakan Indonesia	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>21</b>

**Semester V**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393SS201 Metodologi Penelitian Sosial	3
3	293PP604 Pengenalan Sistem dan Manajemen Basis Data	2
4	293PP310 Birokrasi Pemerintahan Indonesia	2
5	293PP311 Sistem Pemerintahan Desa	2
6	293PP213 Kebijakan Publik	2
7	393PP312 Manajemen Keuangan Daerah	3
8	393PP511 Global E-Government	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>19</b>

**Semester VI**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393PP313 Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
2	293PP605 Pembangunan Masyarakat Lokal	2
3	293PP314 Sistem Pengawasan Pemerintahan	2
4	293PP515 Public E-Service	2
5	393PP316 Perbandingan Sistem Pemerintahan	3
6	293PP214 Sistem Kepartaian Dan Pemilu Indonesia	2
7	293PP512 Artificial Intelligence Dan Big Data Dalam E-Government	
8	393PP513 Desain dan Implementasi Infrastruktur E-Government	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>19</b>

**Semester VII**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393PP317 Kapita Selektta Ilmu Pemerintahan: Isu-Isu E-Government	3
2	293PP607 Transformasi Teknologi Dan Dinamika Pembangunan	2
3	393PP318 Kepemimpinan Pemerintahan	3
4	393PP414 Local E-Government	3
5	293PP515 Analisis dan Evaluasi Sistem E-Government	2
6	393PP516 Magang dan Praktek Lapang Pemerintahan Digital	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>16</b>

**Semester VIII**

<b>No</b>		<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	493PP503	KKLP Plus	3
2	693PP504	Skripsi	6
		<b>Jumlah SKS</b>	<b>9</b>
		<b>Total Keseluruhan SKS</b>	<b>148</b>

**STISIP PETTA BARINGENG**  
**Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Konsentrasi Studi: Pemerintahan dan Keuangan Daerah**

**Semester I**

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	293UU111	Pendidikan Agama	2
2	293UU112	Bahasa Indonesia	2
3	293UU113	Pendidikan Kewarganegaraan Dan Anti Korupsi	2
4	293UU114	Bahasa Inggris	2
5	393SS204	Pengantar Sains Komputer dan ICT	3
6	393PP202	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3
7	393PP201	Dasar-Dasar Ilmu Politik	3
8	393SS205	Pengantar Ilmu Hukum	3
9	393SS209	Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi	3
10	193SS501	Kelas Tutorial I : Keterampilan Teknologi Informasi	1
<b>Jumlah SKS</b>			<b>24</b>

**Semester II**

No		Mata Kuliah	SKS
1	293SS202	Sistem Sosial Indonesia	2
2	293SS101	Dasar-Dasar Filsafat dan Logika	2
3	293IK301	Pengantar Ilmu Komunikasi	2
4	393PP205	Sistem Politik Indonesia	3
5	393PP203	Sistem Pemerintahan Indonesia	3
6	293SS102	Dasar-Dasar E-government/Pemerintahan Digital	2
7	293SS203	Asas-Asas Manajemen	2
8	393SS206	Pengantar Statistik Sosial	3
9	193SS502	Kelas Tutorial II: Keterampilan Teknologi Informasi	1
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>

**Semester III**

No		Mata Kuliah	SKS
1	393PP301	Ekonomi Politik	3
2	393PP207	Konstitusi Dan Kelembagaan Pemerintahan	3
3	393PP208	Teori Politik/Pemerintahan	3
4	293PP601	Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik	2
5	393PP306	Sistem Pemerintahan Daerah	3
6	393PP209	Pemikiran Politik Indonesia	3
7	393PP602	Hukum Tata Pemerintahan	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>

**Semester IV**

No		Mata Kuliah	SKS
1	393PP210	Analisa Politik/Pemerintahan	3
2	293PP307	Etika Politik/Pemerintahan	2
3	393PP308	Manajemen Pemerintahan Daerah	3
4	393IK315	Komunikasi Politik/Pemerintahan	3
5	393PP611	Pengenalan Organisasi dan Jaringan Komputer	3



6	293PP309	Ekologi Pemerintahan	2
7	293PP212	Proses Legislatif Di Indonesia	2
8	393PP603	Sistem Perpajakan Indonesia	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>21</b>

**Semester V**

No	Mata Kuliah	SKS	
1	393SS201 Metodologi Penelitian Sosial	3	
3	293PP604 Pengenalan Sistem dan Manajemen Basis Data	2	
4	293PP310 Birokrasi Pemerintahan Indonesia	2	
5	293PP311 Sistem Pemerintahan Desa	2	
6	293PP213 Kebijakan Publik	2	
7	393PP312 Manajemen Keuangan Daerah	3	
8	393PP414 <b>Sistem Akuntansi Pemerintahan</b>	3	
<b>Jumlah SKS</b>			<b>19</b>

**Semester VI**

No	Mata Kuliah	SKS	
1	393PP313 Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	
2	293PP605 Pembangunan Masyarakat Lokal	2	
3	293PP314 Sistem Pengawasan Pemerintahan	2	
4	293PP515 Public E-Service	2	
5	393PP316 Perbandingan Sistem Pemerintahan	3	
6	293PP214 Sistem Kepartaian Dan Pemilu Indonesia	2	
	393PP411 Desentralisasi Fiskal di Indonesia	3	
7	293PP412 Teori Keuangan Negara dan Daerah	2	
8	393PP413 Manajemen Keuangan Daerah	3	
<b>Jumlah SKS</b>			<b>19</b>

**Semester VII**

No	Mata Kuliah	SKS	
1	393PP317 Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan: Isu-Isu Keuangan Daerah	3	
2	293PP607 Transformasi Teknologi Dan Dinamika Pembangunan	2	
3	393PP318 Kepemimpinan Pemerintahan	3	
4	293PP415 Pembiayaan dan Fiskal Daerah	2	
5	393PP416 Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3	
6	393PP516 Magang dan Praktek Lapang Pemerintahan dan Keuangan Daerah	3	
<b>Jumlah SKS</b>			<b>16</b>

**Semester VIII**

No	Mata Kuliah	SKS	
1	493PP503 KKLP Plus	3	
2	693PP504 Skripsi	6	
<b>Jumlah SKS</b>			<b>9</b>
<b>Total Keseluruhan SKS</b>			<b>148</b>

**STISIP PETTA BARINGENG**  
**Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Konsentrasi Studi: Pemerintahan Kota**

**Semester I**

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	293UU111	Pendidikan Agama	2
2	293UU112	Bahasa Indonesia	2
3	293UU113	Pendidikan Kewarganegaraan Dan Anti Korupsi	2
4	293UU114	Bahasa Inggris	2
5	393SS204	Pengantar Sains Komputer dan ICT	3
6	393PP202	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3
7	393PP201	Dasar-Dasar Ilmu Politik	3
8	393SS205	Pengantar Ilmu Hukum	3
9	393SS209	Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi	3
10	193SS501	Kelas Tutorial I : Keterampilan Teknologi Informasi	1
<b>Jumlah SKS</b>			<b>24</b>

**Semester II**

No		Mata Kuliah	SKS
1	293SS202	Sistem Sosial Indonesia	2
2	293SS101	Dasar-Dasar Filsafat dan Logika	2
3	293IK301	Pengantar Ilmu Komunikasi	2
4	393PP205	Sistem Politik Indonesia	3
5	393PP203	Sistem Pemerintahan Indonesia	3
6	293SS102	Dasar-Dasar E-government/Pemerintahan Digital	2
7	293SS203	Asas-Asas Manajemen	2
8	393SS206	Pengantar Statistik Sosial	3
9	193SS502	Kelas Tutorial II: Keterampilan Teknologi Informasi	1
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>

**Semester III**

No		Mata Kuliah	SKS
1	393PP301	Ekonomi Politik	3
2	393PP207	Konstitusi Dan Kelembagaan Pemerintahan	3
3	393PP208	Teori Politik/Pemerintahan	3
4	293PP601	Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik	2
5	393PP306	Sistem Pemerintahan Daerah	3
6	393PP209	Pemikiran Politik Indonesia	3
7	393PP602	Hukum Tata Pemerintahan	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>20</b>

**Semester IV**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393PP210 Analisa Politik/Pemerintahan	3
2	293PP307 Etika Politik/Pemerintahan	2
3	393PP308 Manajemen Pemerintahan Daerah	3
4	393IK315 Komunikasi Politik/Pemerintahan	3
5	393PP611 Pengenalan Organisasi dan Jaringan Komputer	3
6	293PP309 Ekologi Pemerintahan	2
7	293PP212 Proses Legislatif Di Indonesia	2
8	393PP603 Sistem Perpajakan Indonesia	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>21</b>

**Semester V**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393SS201 Metodologi Penelitian Sosial	3
3	293PP604 Pengenalan Sistem dan Manajemen Basis Data	2
4	293PP310 Birokrasi Pemerintahan Indonesia	2
5	293PP311 Sistem Pemerintahan Desa	2
6	293PP213 Kebijakan Publik	2
7	393PP312 Manajemen Keuangan Daerah	3
8	393PP421 Pemerintahan Kota di Indonesia	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>19</b>

**Semester VI**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393PP313 Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
2	293PP605 Pembangunan Masyarakat Lokal	2
3	293PP314 Sistem Pengawasan Pemerintahan	2
4	293PP515 Public E-Service	2
5	393PP316 Perbandingan Sistem Pemerintahan	3
6	293PP214 Sistem Kepartaian Dan Pemilu Indonesia	2
7	293PP422 Manajemen Perkotaan	
8	393PP423 Sistem Permukiman Kota	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>19</b>

**Semester VII**

No	Mata Kuliah	SKS
1	393PP317 Kapita Selektta Ilmu Pemerintahan: Isu-Isu Perkotaan	3
2	293PP607 Transformasi Teknologi Dan Dinamika Pembangunan	2
3	393PP318 Kepemimpinan Pemerintahan	3
4	393PP424 Ekologi Perkotaan	3
5	293PP425 Sistem Transportasi Perkotaan	2
6	393PP426 Magang dan Praktek Lapang Pemerintahan Kota	3
<b>Jumlah SKS</b>		<b>16</b>

**Semester VIII**

<b>No</b>		<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	493PP503	KKLP Plus	3
2	693PP504	Skripsi	6
		<b>Jumlah SKS</b>	<b>9</b>
		<b>Total Keseluruhan SKS</b>	<b>148</b>

**STISIP PETTA BARINGENG****Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan****Konsentrasi Studi: Pemerintahan Desa****Semester I**

<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	293UU111	Pendidikan Agama	2
2	293UU112	Bahasa Indonesia	2
3	293UU113	Pendidikan Kewarganegaraan Dan Anti Korupsi	2
4	293UU114	Bahasa Inggris	2
5	393SS204	Pengantar Sains Komputer dan ICT	3
6	393PP202	Pengantar Ilmu Pemerintahan	3
7	393PP201	Dasar-Dasar Ilmu Politik	3
8	393SS205	Pengantar Ilmu Hukum	3
9	393SS209	Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi	3
10	193SS501	Kelas Tutorial I : Keterampilan Teknologi Informasi	1
<b>Jumlah SKS</b>			<b>24</b>

**Semester II**

<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	293SS202	Sistem Sosial Indonesia	2
2	293SS101	Dasar-Dasar Filsafat dan Logika	2
3	293IK301	Pengantar Ilmu Komunikasi	2
4	393PP205	Sistem Politik Indonesia	3
5	393PP203	Sistem Pemerintahan Indonesia	3
6	293SS102	Dasar-Dasar E-government/Pemerintahan Digital	2
7	293SS203	Asas-Asas Manajemen	2
8	393SS206	Pengantar Statistik Sosial	3
9	193SS502	Kelas Tutorial II: Keterampilan Teknologi Informasi	1

	<b>Jumlah SKS</b>	<b>20</b>
<b>Semester III</b>		
<b>No</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	393PP301 Ekonomi Politik	3
2	393PP207 Konstitusi Dan Kelembagaan Pemerintahan	3
3	393PP208 Teori Politik/Pemerintahan	3
4	293PP601 Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik	2
5	393PP306 Sistem Pemerintahan Daerah	3
6	393PP209 Pemikiran Politik Indonesia	3
7	393PP602 Hukum Tata Pemerintahan	3
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>20</b>
<b>Semester IV</b>		
<b>No</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	393PP210 Analisa Politik/Pemerintahan	3
2	293PP307 Etika Politik/Pemerintahan	2
3	393PP308 Manajemen Pemerintahan Daerah	3
4	393IK315 Komunikasi Politik/Pemerintahan	3
5	393PP611 Pengenalan Organisasi dan Jaringan Komputer	3
6	293PP309 Ekologi Pemerintahan	2
7	293PP212 Proses Legislatif Di Indonesia	2
8	393PP603 Sistem Perpajakan Indonesia	3
	<b>Jumlah SKS</b>	<b>21</b>
<b>Semester V</b>		
<b>No</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
1	393SS201 Metodologi Penelitian Sosial	3
3	293PP604 Pengenalan Sistem dan Manajemen Basis Data	2
4	293PP310 Birokrasi Pemerintahan Indonesia	2
5	293PP311 Sistem Pemerintahan Desa	2

6	293PP213	Kebijakan Publik	2
7	393PP312	Manajemen Keuangan Daerah	3
8	393PP431	Administrasi Pemerintahan Desa	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>19</b>

**Semester VI**

No		Mata Kuliah	SKS
1	393PP313	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
2	293PP605	Pembangunan Masyarakat Lokal	2
3	293PP314	Sistem Pengawasan Pemerintahan	2
4	293PP515	Public E-Service	2
5	393PP316	Perbandingan Sistem Pemerintahan	3
6	293PP214	Sistem Kepartaian Dan Pemilu Indonesia	2
7	293PP432	Pemerintahan Tradisional dan Desa di Sulsel	2
8	393PP433	Pembiayaan dan Pengelolaan Anggaran Desa	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>19</b>

**Semester VII**

No		Mata Kuliah	SKS
1	393PP317	Kapita Selektta Ilmu Pemerintahan: Isu-Isu Perdesaan	3
2	293PP607	Transformasi Teknologi Dan Dinamika Pembangunan	2
3	393PP318	Kepemimpinan Pemerintahan	3
4	393PP434	Kepemimpinan Desa	3
5	293PP435	Perencanaan Pembangunan Perdesaan	2
	393PP436	Ekologi Pemerintahan Desa	3
6	393PP426	Magang dan Praktek Lapang Pemerintahan Desa	3
<b>Jumlah SKS</b>			<b>16</b>

**Semester VIII**

No		Mata Kuliah	SKS
1	493PP503	KKLP Plus	3

2	693PP504	Skripsi	6
<b>Jumlah SKS</b>			<b>9</b>
<b>Total Keseluruhan SKS</b>			<b>148</b>



## VII. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

### KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

#### STISIP PETTA BARINGENG

##### **Pendidikan Agama (MPK) 2 SKS**

Mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan kepribadian keagamaan yang beriman dan bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia serta menjadikan ajaran agama sebagai landasan berfikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi.

##### **Bahasa Inggris (MPK) 2 SKS**

Mengantarkan mahasiswa agar dapat memahami pengetahuan *Grammar* atau *Structure* dan dapat menerapkannya dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang dilatihkan melalui kemahiran bahasa - *Reading Comprehension* dan *Writing* guna memahami berbagai referensi yang berbahasa Inggris dan menunjang pemerolehan serta penerapan ilmu yang dipelajari pada program studi.

##### **Dasar-Dasar Ilmu Politik (MKK) 3 SKS**

Menguraikan dan menjelaskan mengenai peristilahan politik/Ilmu Politik, pengertian dan ruang lingkup serta kajian Ilmu Politik, konsep-konsep pokok Ilmu Politik, pendekatan-pendekatan studi politik, tentang negara, teori/hakikat negara, asal usul negara, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur formal dan material negara, tentang demokrasi, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horisontal, UUD dan konvensi, sistem kepartaian dan badan-badan pemerintahan, *rule making function*, *rule application function*, dan *rule adjudication* serta tentang sistem Pemilu (secara ringkas).

##### **Dasar-Dasar Ilmu Sosial (MKK) 3 SKS**

Membahas tentang ruang lingkup ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi dan antropologi, ruang lingkup, objek dan metode, perkembangan ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu, konsep-konsep tentang : masyarakat, kebudayaan, proses-proses sosial dan interaksi sosial, organisasi sosial, pranata sosial, ketertiban sosial dan pengendalian sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang,

mobilitas sosial, perubahan-perubahansosial dikaitkan dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di Indonesia

### **Sistem Hukum Indonesia (MKK) 3 SKS**

Menguraikan pengertian sistem hukum, hukum Indonesia, dan sistem hukum Indonesia, sistem hukum adat dan hukum kebiasaan, sistem hukum islam sistem hukum tata negara, sistem hukum perdata dan sistem hukum dagang. Selanjutnya membahas sistem hukum acara perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum acara pidana, sistem hukum administrasi negara, sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional.

### **Sistem Ekonomi Indonesia (MKK) 3 SKS**

Dibahas mengenai pengertian sistem ekonomi Indonesia, dibahas juga mengenai bentuk-bentuk perekonomian di negara-negara sedang berkembang, tingkat hidup dan peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, akumulasi sumber daya produksi, manusia dan alam, alokasi, pola pembagian pendapatan dan kekayaan, faktor sosial budaya, struktur perekonomian Indonesia, menjelang abad 21 (*liberalisme* ekonomi dunia).

### **Pengantar Ilmu Pemerintahan (MKK) 3 SKS**

Menguraikan tentang pengertian pemerintah, pemerintahan, pemerintahan sebagai suatu ilmu, objek ilmu pemerintahan, pemerintahan sebagai kebutuhan, pemerintahan sebagai suatu sistem, tahap-tahap pembangunan pemerintahan, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu lain, kekuasaan dalam pemerintahan, macam dan tipe pemerintahan, kepemimpinan dalam pemerintahan, konsep-konsep dalam ilmu pemerintahan.

### **Pendidikan Kewarganegaraan (MPK) 2 SKS**

Mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani dan membantu mahasiswa selaku warganegara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dengan kompetensi menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual yang memiliki: wawasan kesadaran bernegara; untuk belanegara dengan perilaku

cinta tanah air; wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demiketahanan nasional; pola pikir, sikap, yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupannasional.

### **Bahasa Indonesia (MPK) 2 SKS**

Pengajaran Bahasa Indonesia bagi para mahasiswa lebih diarahkan pada pemahaman dan penguasaan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mahasiswa dapatmemanfaatkannya dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu agar mahasiswa memahami kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara sehinggadapat menggunakannya dengan baik dan benar khususnya dalam situasi formal

### **Sistem Sosial Indonesia (MKK) 3 SKS**

Menguraikan dan membahas tentang konsep sistem sosial, kelompok sosial di Indonesia (politik,ekonomi dan kultural), kepemimpinan sosial di Indonesia, struktur majemuk masyarakatIndonesia, perkembangan kebudayaan Indonesia, diversitas Indonesia dilihat dariperkembangannya.

### **Dasar-Dasar Logika (MKB) 3 SKS**

Dibahas tentang definisi dan objek dari logika, terminologi logika, bahasa logika, dan jenis-jenislogika. Diberikan juga pengenalan dan pemahaman tentang jenis-jensi definisi serta teknikmembuat definisi. Dijelaskan pula tentang inferensi dengan jenis-jenisnya. Dijelaskan jugatentang kesesatan berpikir, jenis-jenis kesesatan yang umum dilakukan, serta upaya untukmengatasi kesesatan tersebut. Dibahas juga tentang figura dengan model-modelnya danpenggunaan term M (medium) sebagai kunci dalam figura. Dibahas juga tentang modus silogismedengan bentuk-bentuk silogisme yang didasarkan pada kualitas dan kuantitas kedua proposisiyang menjadi premis-premisnya. Diuraikan dari segi kualitas dan kuantitas proposisi, ada 4(empat) jenis proposisi yaitu a, e, i, dan o. Keempat proposisi itu akan menghasilkan 16 (enambelas) modus silogisme. Diuraikan juga tentang deduksi dan induksi logika, alat bantumenggunakan diagram venn dan lambang boole. Diberikan pemahaman silogisme kategoris dansilogisme hipotetis. Orientasi dalam logika menggunakan hukum dasar logika. Pengertian tentangkategori dan jenisnya menjadi pokok bahasan sebelum ujian akhir tertulis.

### **Teori Politik (MKB) 3 SKS**

Menguraikan tentang posisi teori dan filsafat politik dalam studi Ilmu Pemerintahan; hubungandan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian teori, dan filsafat politik; arti dan hakekat teoridan filsafat politik, macam/jenis teori politik, derajat teori politik, fungsi dan manfaat (ruangLingkup) teori dan filsafat politik; perkembangan teori politik.

### **Konstitusi Dan Pemerintahan (MPB) 2 SKS**

Menguraikan dan menjelaskan tinjauan umum tentang konstitusi, konstitusi dan pemerintahan, daya ikat konstitusi, perbandingan konstitusi, konstitusi Negara Indonesia, prosedurdan sistem perubahan konstitusi, dan pengertian kelembagaan pemerintahan.

### **Ekonomi Politik (MKB) 2 SKS**

Membahas, keterkaitan ekonomi dan politik dengan pendekatan demografi, geografi, sistem, fungsi pemerintahan dalam ekonomi, politik dan kebijakan ekonomi, pengaruh penerimaan dan pengeluaran, privatisasi, serta lembaga-lembaga ekonomi.

### **Pengantar Statistik Sosial (MKB) 3 SKS**

Membahas pengertian statistik dan statistika, data statistik dan penyajian data, berbagai ukuran statistik, statistik deskriptif dan statistik induktif.

### **Asas-Asas Manajemen (MKB) 2 SKS**

Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen; sejarah perkembangan teori manajemen; mashab-mashab serta fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, komunikasi, dan pengawasan, serta penjasasingkat mengenai manajemen konflik.

### **Sistem Pemerintahan Indonesia (MKB) 3 SKS**

Menguraikan pemerintahan Indonesia dengan pendekatan sistem, sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan campuran. Selain itu menguraikan sistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi versus sistem

pemerintahan otoriter, serta sistem pemerintahan dan kelembagaan serta konstitusi di Indonesia.

### **Pengantar Ilmu Komunikasi (MKB) 2 SKS**

Mata kuliah ini secara umum menguraikan konsep, teori, dan paradigma komunikasi dan filsafat komunikasi, perkembangan teori komunikasi. Secara khusus, membahas teori komunikasi mulai dari pengertian manajemen komunikasi, teori komunikasi massa, teori persuasif dan koersif, sampai teori opini publik, serta efek komunikasi.

### **Pemikiran Politik Indonesia 2 SKS**

Membahas mengenai berbagai pemikiran politik Indonesia, menjelaskan sejarah terbentuknya struktur dan kelembagaan negara termasuk filosofi dan berbagai budaya masyarakat yang menjadi fondasi lahirnya negara Indonesia. Menggambarkan kepolitikan yang mendasari lahirnya konsep-konsep politik di Indonesia.

### **Psikologi Sosial (MPB) 2 SKS**

Membahas tentang sejarah, pengertian konsep dan ruang lingkup psikologi sosial; aliran-aliran dan penggunaan metode dalam psikologi sosial; hubungan dengan disiplin ilmu lain terutama dengan Sosiologi dan Antropologi; tingkah laku manusia dalam situasi sosial dan dinamika kelompok, serta faktor penentunya.

### **Hukum Tata Pemerintahan (MKB) 2 SKS**

Membahas pertumbuhan terminologi hukum tata pemerintahan yang berasal dan termasuk Hukum Administrasi Negara, membahas penentuan scope Hukum Tata Pemerintahan melalui rumus teori/definisi para ahli hukum serta metode pemisahan Hukum Tata Pemerintahan dengan Hukum Tata Negara dalam arti luas, membahas tindakan/perbuatan hukum alat perlengkapan negara terutama dari bentuk ketetapan (*beschikking*) sebagai landasan hukum dalam era pembangunan dikaitkan dengan tujuan negara sebagai *welfare state* (negara kesejahteraan) serta Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Filsafat Ilmu (MKB) 3 SKS**

Dibahas tentang etimologi dan definisi dari filsafat, dan kedudukan filsafat ilmu sebagai salah satu cabang dari filsafat. Pemahaman substansi antar ilmu pengetahuan dan pengetahuan disertai dengan contoh-contohnya. Diberikan pemahaman tentang evolusi pengetahuan berkaitan dengan sejarah timbulnya filsafat. Mitos dan lahirnya filsafat sebagai upaya mencari kebenaran. Diberikan pemahaman tentang perkembangan kebudayaan manusia yang relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan mengenai pengetahuan ilmiah dan pengetahuan eksistensial. Dipelajari juga berbagai macam aliran dalam filsafat dengan tokoh-tokohnya. Penjelasan tentang aposteriori dan apriori dilengkapi dengan konsep dan contoh-contohnya. Kelebihan dan kekurangan dari positivisme ilmu menjadi pokok bahasan. Antara ilmu manusia dan ilmu alam siapa yang lebih unggul? Pembahasan menjadi komprehensif dan objektif. Memahami aliran neokantianisme dalam metodologi ilmu. Perkembangan terakhir antarpenguasaan ilmu dan pengetahuan etika sehingga membentuk teori etika klasik. Prinsip-prinsip utama etika dalam kegiatan ilmu pengetahuan.

### **Sistem Pemerintahan Daerah (MKB) 3 SKS**

Menguraikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, landasan hukum dan dasar pertimbangan perlunya pemerintahan di daerah; azas penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan), hubungan pusat-daerah, otonomi daerah (jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhinya), demokrasi tingkat lokal, hubungan eksekutif dan legislatif tingkat lokal, pemerintahan daerah di negara kesatuan dan federal, *Local Good Governance* dan *Reinventing Government*.

### **Sistem Perpajakan Di Indonesia (MKB) 2 SKS**

Membahas secara umum pengertian pajak, konsep dan dasar hukum perpajakan, fungsi pajak, pengelolaan pajak dan teknik pemungutan pajak, jenis-jenis pajak di Indonesia, latar belakang dan proses serta mekanisme perpajakan di Indonesia, serta perhitungan pajak-pajak di Indonesia

### **Sistem Politik Indonesia (MKB) 3 SKS**

Menjelaskan makna sistem, makna politik, makna sistem politik, sistem politik Indonesia, proses *input*, konversi, *output*, budaya politik, dan kecenderungan budaya politik Indonesia, komponen-komponen suprastruktur politik,

lingkungan domestik maupun internasional, mekanisme dan dinamika sistem politik Indonesia (awal kemerdekaan, parlementer, terpimpin, orde baru, dan reformasi)

### **Studi Kependudukan (MKB) 2 SKS**

Membahas tentang konsep dasar dan teori demografi dan studi kependudukan; variabel-variabel demografi dan non demografi, serta sumber-sumber data kependudukan. Selain itu menguraikan tentang permasalahan kependudukan yang dihadapi negara Indonesia dan negara berkembang lainnya, dasar teori kebijakan kependudukan, beberapa pendekatan dan pokok-pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kependudukan, dan tentang pelaksanaan kebijakan kependudukan.

### **Manajemen Pemerintahan (MKB) 3 SKS**

Membahas tentang kegiatan manajemen dalam pemerintahan, yaitu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penganggaran. Selain itu, juga menguraikan tentang manajemen pemerintahan suatu negara, baik manajemen pemerintahan tingkat desa/kelurahan, manajemen pemerintahan tingkat Daerah, dan manajemen pemerintahan tingkat Pusat, serta pelaksanaan koordinasi pemerintahan.

### **Komunikasi Pemerintahan (MKB) 2 SKS**

Membahas tentang substansi dan paradigma komunikasi dalam proses pemerintahan dan politik, ideologi-ideologi komunikasi, teknik-teknik informasi, *public opinion*, komunikasi timbal balik, dan teknik-teknik propaganda, *campaign management*.

### **Etika Pemerintahan (MPB) 2 SKS**

Membahas dan menguraikan tentang posisi teori dan filsafat pemerintahan/politik dalam studi ilmu pemerintahan; hubungan dan sifat/ciri antara konsep, pemikiran, pengertian dan filsafat pemerintahan/politik; arti dan hakekat filsafat pemerintahan, macam/jenis teori pemerintahan/politik, derajat teori, fungsi dan manfaat (ruang lingkup) teori dan filsafat pemerintahan/politik; filsafat pemerintahan klasik; filsafat pemerintahan

modern dan pasca modern; kontemporer; teori-teori dasar, *middle* dan umum, serta pandangan etikanya.

### **Politik Agraria (MKK) 2 SKS**

Menguraikan sejarah perundang-undangan agraria sejak masa Hindia Belanda sampai masa Proklamasi Kemerdekaan serta setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan dibahas usaha-usaha menghilangkan dualisme hukum dalam lapangan agraria/pertanahan. Juga dibahas tentang keterkaitan pertanahan dengan gejala sosial politik konflik pertanahan.

### **Sistem Pemerintahan Desa (MKK) 3 SKS**

Membahas dan menguraikan tentang desa dalam berbagai sudut pandang, politik dan pemerintahan desa (*rural politics*); kedudukan pemerintahan desa/kota dalam sistem pemerintahan secara keseluruhan; kelembagaan-kelembagaan desa; dan aktor-aktor dinamik desa.

### **Ekologi Pemerintahan (MKK) 2 SKS**

Menguraikan mengenai: konsep ekologi, ekologi manusia, pendekatan ekologi manusia, faktor-faktor ekologi manusia, ekologi sosial, analisa ekologi pemerintahan, Model-model ekologi pemerintahan.

### **Manajemen Sumber Daya Manusia (MKB) 3 SKS**

Membahas dan menjelaskan permasalahan SDM khususnya di Indonesia, perbedaan dan persamaan MSDM dengan Manajemen Personalia, pendekatan dan pengertian MSDM, pengadaan pengembangan tenaga kerja (perencanaan aparat pemerintah), kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian, konflik dalam organisasi, serta penjelasan singkat mengenai *total quality control* dan *quality control circle*.

### **Proses Legislatif Di Indonesia (MKB) 2 SKS**

Membahas tentang proses politik penetapan peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat, daerah, maupun desa. Hubungan eksekutif dan legislatif dalam menyusun peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat, daerah,



maupun desa. serta membahas teknik pembuatan peraturan, seperti tata bahasa, sistematika, dan kaidah-kaidah formal maupun materiil.

### **Birokrasi Pemerintahan Indonesia (MKB) 2 SKS**

Membahas mengenai konsep-konsep birokrasi dan perkembangannya di Indonesia, hubungan birokrasi dan politik, perkembangan teori birokrasi.

### **Keuangan Daerah (MKB) 3 SKS**

Menguraikan tentang pengertian keuangan pemerintah RI, baik yang berkaitan dengan keuangan negara maupun yang menyangkut masalah keuangan Pemerintah di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota), termasuk keuangan desa. Memberikan pemahaman tentang keuangan negara antara lain menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan negara serta beberapa kebijakan keuangan pemerintah (moneter, fiskal dan internasional). Selanjutnya pembahasan keuangan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, macam-macam sumber keuangan daerah serta hubungan keuangan daerah dengan keuangan negara, termasuk di dalamnya membahas anggaran yang meliputi pengertian anggaran, jenis-jenis anggaran, fungsi anggaran, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **Pembangunan Politik (MKB) 2 SKS**

Membahas pertumbuhan dan perkembangan kehidupan politik suatu bangsa dan negara, khususnya di Indonesia baik secara struktural, kelembagaan, maupun perilaku. Selain itu mengkaji konsep-konsep, sosialisasi politik, budaya politik, parlementaria, pemilu, kedudukan militer dan birokrasi dalam politik, integrasi nasional, serta masalah-masalah demokrasi.

### **Metode Penelitian Sosial Kuantitatif/Kualitatif (MPB) 2 SKS**

Membahas secara umum pengertian metode, *research* serta hal-hal yang diperlukan dalam *research*, langkah-langkah dalam *research*, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data hasil *research* khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, membahas secara umum pengertian metode, *research* serta hal-hal yang diperlukan dalam *research*, langkah-langkah dalam

*research*, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data hasil *research* khususnya dalam bidang sosial (pemerintahan) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

### **Sistem Pengawasan Pemerintahan (MKB) 2 SKS**

Membahas mengenai pengawasan, aspek-aspek pengawasan, ruang lingkup pengawasan, pengawasan internal dan eksternal, pengawasan sosial dan politik, pengawasan fungsional, pengawasan melekat, dan pengawasan pembangunan.

### **Kebijakan Publik (MKB) 3 SKS**

Membahas tentang masalah kebijakan yang akan diagendakan ke dalam perumusan kebijakan dan diadopsi ke dalam implementasi kebijakan serta dilakukan evaluasi kebijakan. Dibahas pula tentang kerangka dasar analisis kebijakan publik yang lebih berorientasi pada penelitian kebijakan (*policy research*).

### **Pelayanan Publik (MKB) 2 SKS**

Membahas pengertian dan kaitan masyarakat dengan kepentingan umum, pengertian dan makna pelayanan publik beserta ruang lingkungannya, pelayanan publik dan birokrasi, penyelenggara dan pelaksana manajemen pelayanan publik dan sipil, sasaran dan bentuk-bentuk manajemen pelayanan publik dan sipil, faktor pendukung pelaksana pelayanan publik dan sipil, motif dan sikap serta tingkah laku dalam pelayanan publik dan sipil.

### **Sistem Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia (MKK) 3 SKS**

Membahas perkembangan kepartaian dan pemilihan umum di Indonesia, pola-pola system kepartaian yang pernah berlaku di Indonesia, *voting behavior*, isu-isu sekitar Pemilihan Umum, tingkah laku partai politik dan organisasi massanya, mekanisme sekitar restrukturisasi kepartaian serta sistem rekrutmen dalam pemilu serta analisis perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur kepartaian dan pemilu di Indonesia.

### **Perbandingan Sistem Pemerintahan (MKK) 3 SKS**

Menguraikan tentang makna perbandingan khususnya perbandingan sistem pemerintahan dan pendekatan-pendekatan studi perbandingan sistem pemerintahan.

### **Pembangunan Masyarakat Lokal (MKB) 3 SKS**

Menjelaskan tentang teori pembangunan, pendekatan-pendekatan dalam pembangunan dan pembangunan masyarakat, strategi-strategi untuk perubahan, strategi pembangunan masyarakat: pengembangan komunitas (*community development*), *Participatory Rural Appraisal*, konsep kapital sosial dan pengembangannya. Perkuliahan dilengkapi dengan melaksanakan kegiatan praktikum lapangan.

### **Metodologi Ilmu Pemerintahan (MPB) 3 SKS**

Membahas mengenai penerapan metode penelitian dalam mengkaji fenomena pemerintahan, membangun, menerapkan, menyeleksi teori dan strategi, etika, penelitian pemerintahan, etika masyarakat ilmiah, etika masyarakat pengguna, etika masyarakat objek penelitian, dan etika penelitian.

### **Kepemimpinan Pemerintahan (MKB) 2 SKS**

Menguraikan dan menjelaskan pengertian kepemimpinan pemerintahan Indonesia dan variabel-variabel, komponen-komponen, sikap dasar dan sifat-sifatnya, tujuan, pelaksana teknik-teknik dan gaya kepemimpinan berdasarkan filsafat bangsa Indonesia dan perkembangannya dari tingkat atas (Nasional) sampai dengan tingkat Daerah dan Desa/Kelurahan.

### **Perubahan Sosial Dan Dinamika Pemerintahan (MPB) 3 SKS**

Membahas tentang teori-teori perubahan sosial, jenis-jenis perubahan sosial, menganalisis perubahan sosial yang terjadi di pemerintahan.

### **Perencanaan Penelitian (MPB) 2 SKS**

Menjelaskan bagaimana melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sesuai dengan pedoman/panduan penyusunan skripsi yang berlaku di Universitas Padjadjaran.

### **Perencanaan Pembangunan 2 (MKB) 2SKS**

Membahas tentang manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan, peran perencanaan strategis dalam pembangunan terutama pembangunan daerah. merumuskan suatu visi, misi, dan strategi dalam pembangunan. Strategi-strategi dalam perencanaan pembangunan.

### **Sistem Akuntansi Pemerintahan (MKB) 2 SKS**

Menguraikan tentang tujuan akuntansi pemerintahan, siklus anggaran negara, pengawasan keuangan negara, *funds accounting*, penyusunan laporan berbagai kebijakan pembangunan nasional, regional, lokal, dan sektoral.

### **Kepemimpinan Desa (MKB) 2 SKS**

Menguraikan aspek normatif dan teoritis kepemimpinan kepala desa/ kepala kelurahan. Selain itu menguraikan pengaruh Kemampuan Kedudukan kepemimpinan yang mempunyai *Position Power* dan *Personal Power*.

### **Ekologi Perkotaan (MKB) 2 SKS**

Menguraikan kebijakan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, suatu karya yang juga memperhatikan nilai sosial/budaya masyarakat, daya dukung lingkungan dan berfikir secara holistik dalam merancang suatu bangunan atau kawasan. Fungsi ekologis yang mampu 'menghidupi' kebutuhan pokok masyarakat kota dari mulai air bersih, pengaturan pembuangan limbah, polusi udara, transportasi, dan lahan hijau

### **Ekologi Perdesaan (MKB) 2 SKS**

Menguraikan bentuk-bentuk kebijaksanaan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, sebagai faktor-faktor ekologi pemerintahan. Menguraikan pula administrasi pemerintahan desa mengatasi kekurangan yang

dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Serta upaya-upaya perbaikan terhadap peningkatan pada sistematika dan mekanisme dalam ekologi dalam suatu pemerintahan desa.

### **Pelayanan Publik Perkotaan (MKB) 2 SKS**

Menguraikan jasa pelayanan publik perkotaan menurut prinsip-prinsip pelayanan publik baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta produk-produk pelayanannya.

### **Desentralisasi Fiskal Di Indonesia (MKB) 2 SKS**

Menguraikan paradigma desentralisasi fiskal di Indonesia dan perumusan kebijakan desentralisasi. Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ditata kembali. Secara spesifik, peranan pemerintah provinsi dikembalikan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

### **Perencanaan Pembangunan Perdesaan (MKB) 2 SKS**

Menguraikan perencanaan pembangunan perdesaan meliputi profil wilayah, kebijakan pembangunan, kultur budaya perdesaan, partisipatif masyarakat desa. Perencanaan perdesaan meliputi analisis meliputi prioritas masalah, potensi dan sasaran program.

### **Administrasi Pemerintahan Desa (MKB) 2 SKS**

Membahas tentang dasar-dasar pembentukan pemerintahan desa, pemerintahan desa di Indonesia, desa menurut undang-undang otonomi daerah, kewenangan desa, keuangan pemerintah desa, kebijakan desa, pelayanan dan administrasi pemerintahan desa, sistem sosial masyarakat desa, manajemen pemerintahan dan pembangunan desa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengaplikasikan konsep dan teori administrasi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Sistem Permukiman Daerah (MKB) 2 SKS**

Menguraikan aspek-aspek kebijakan perumahan dan permukiman serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan perancangan perumahan dan permukiman pada daerah perkotaan.

### **Sistem Transfortasi Daerah (MKB) 2 SKS**

Menguraikan aspek-aspek kebijakan sistem transportasi daerah, seperti pasar jasa transportasi (kebutuhan perjalanan ), aspek biaya, tarif, serta investasi seluruh moda transportasi yang ada.

### **Teori Keuangan Negara (MKB) 2 SKS**

Mata kuliah ini membahas dasar dasar ilmu keuangan negara, Penerimaan negara, Pengeluaran negara, anggaran negara dan kebijakan keuangan negara.

### **Pelayanan Publik Perkotaan (MKB) 2 SKS**

Membahas tentang pengertian manajemen pelayanan publik perkotaan, filosofi manajemen pelayanan publik kota, ruang lingkup manajemen pelayanan publik serta arti penting manajemen pelayanan publik. perkotaan

### **KKLP (MBB) 3 SKS**

Falsafah, sejarah dan tujuan KKNM, metode pendekatan sosial dan metode menggerakkan melalui KKLP, metode observasi untuk identifikasi dan perumusan masalah teknik penyusunan program kerja, teknik evaluasi dan penyusunan laporan, berbagai kebijakan pembangunannasional, regional dan lokal serta sektoral, pendalaman materi bidang ilmu dan profesi yang praktis untuk kerja lapangan (membantu memecahkan masalah di lapangan melalui peningkatan sumber daya lokal).

### **Kapita Selekt Pemerintahan (MPB) 2 SKS**

Membahas tentang pemahaman ilmu sosial, ilmu politik, ilmu pemerintahan, sistem politik Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Indonesia, *Good Governance* dan *Civil Society* yang penyelenggaraannya disajikan dalam bentuk seminar.